

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Halim (2015:167), ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu:

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pengertian otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengurus daerahnya sendiri mulai dari menggerakkan roda pemerintahan daerah sendiri dan mengelola kekayaan daerah dan juga mengelola mengenai keuangan daerah secara mandiri.

2.1.2 Keuangan Daerah

Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 1 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah, keuangan dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan ruang lingkup keuangan daerah pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah.

2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (lampiran I.02 Pernyataan No. 01), “laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.” Selanjutnya pada PP Nomor 71 Tahun 2010 paragraf 24-25 disebutkan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila kepala daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran I.02 Pernyataan No. 01) bahwa:

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, dan ekuitas pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan pemerintah daerah, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan, memastikan ketaatan penyajian dan kesesuaian penyajian laporan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.3.3 Unsur Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I.01 tentang Kerangka Konseptual, laporan keuangan pemerintah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan LRA, belanja, transfer dan pembiayaan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur-unsur dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas.
4. Laporan Operasional (LO)
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur Laporan Operasional terdiri dari pendapatan LO, beban, transfer dan pos luar biasa.
5. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur-unsur Laporan Arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan

Saldo Anggaran Lebih (SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas. CaLK merupakan rincian atau penjelasan lebih lanjut mengenai pos-pos laporan keuangan yang tidak terpisahkan.

2.1.3.4 Entitas Akuntansi dan Pelaporan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I.01 tentang Kerangka Konseptual dijelaskan bahwa:

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Sedangkan entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikann laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Masing-masing Kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat;
- d. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/ daerah atau organisasi lainnya, sesuai peraturan peundang-undangan yang wajib menyajikan laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa entitas akuntansi dan entitas pelaporan saling berkaitan dan tidak semua entitas akuntansi merupakan entitas pelaporan.

2.1.4 Analisis Laporan Keuangan

Menurut Mahmudi (2016:89), “analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik.”

2.1.4.1 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan. Meskipun laporan keuangan sudah dibuat lebih umum dan

sesederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca laporan dapat memahami laporan tersebut dengan baik. Karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, maka ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut dapat dibantu dengan analisis laporan keuangan.

Menurut Mahmudi (2016:9), “analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan digunakan untuk membantu para pihak yang berkepentingan tersebut dalam memahami laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan.

2.1.4.2 Teknik Analisis Laporan Keuangan

Dalam menganalisis laporan keuangan diperlukan beberapa teknik sehingga analisis yang dilakukan dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Menurut Mahmudi (2016:90-92) terdapat beberapa teknik analisis laporan keuangan, antara lain:

1. Analisis Varians (Selisih)
Analisis varians (selisih) pada umumnya digunakan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran, yaitu dilakukan dengan cara mengevaluasi selisih yang terjadi antara anggaran dengan realisasi. Aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam analisis varians yang pertama menentukan tingkat signifikansi selisih anggaran tersebut apakah selisih anggaran dan realisasi dinilai signifikan atau tidak. Jika tidak dapat diabaikan, jika signifikan maka perlu dianalisis lebih lanjut. Kedua, menentukan tingkat varians (selisih) anggaran yang bisa ditoleransi, berapa besar penyimpangan anggaran yang masih dalam batas wajar dan selanjutnya mencari penyebab terjadinya selisih anggaran.
2. Analisis Rasio Keuangan
Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Terdapat berbagai macam analisis rasio keuangan yang terdiri dari analisis aset, likuiditas, solvabilitas, kewajiban (leverage), ekuitas, profitabilitas, dan aktifitas.

3. Analisis Pertumbuhan (Trend)
Analisis pertumbuhan atau tren dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Analisis ini penting untuk mengetahui sejarah perkembangan kinerja. Analisis ini dapat diaplikasikan misalnya untuk meniali pertumbuhan aset pendapatan, utang, surplus/defisit, dan sebagainya.
4. Analisis Regresi
Analisis regresi dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi bermanfaat untuk riset kebijakan publik yang hasilnya dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah.
5. Analisis Prediksi
Data laporan keuangan juga dapat digunakan untuk analisis prediksi atau proyeksi. Misalnya untuk memprediksi pendapatan tahun depan dapat digunakan data tahun ini dan beberapa tahun lalu sebagai dasar prediksi. Demikian pula untuk prediksi belanja bisa digunakan data dari laporan keuangan. Data laporan keuangan pemerintah daerah selama beberapa tahun juga dapat digunakan untuk memprediksi kesehatan, kekuatan, dan kesinambungan keuangan daerah di masa datang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan memerlukan teknik tertentu agar kegiatan analisisnya bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Teknik analisis laporan keuangan yang dapat digunakan antara lain analisis varians (selisih), analisis rasio keuangan, analisis pertumbuhan (*trend*), analisis regresi dan analisis prediksi.

2.1.4.3 Tahapan Analisis Laporan Keuangan

Menurut Mahmudi (2016:87-89), langkah-langkah atau tahapan dalam menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Menilai Kinerja Makro
Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam analisis laporan keuangan adalah menilai kinerja makro. Hal ini sangat penting karena keberhasilan atau kegagalan dalam kinerja makro ini sangat berkaitan dengan laporan keuangan yang merupakan gambaran kinerja mikro. Kinerja makro merupakan cerminan dari kinerja mikro. Oleh karena itu, jika kinerja makro kurang baik, maka besar kemungkinan kinerja mikro juga kurang baik. Memang dalam konsisi tertentu bisa jadi kinerja mikro sudah baik tetapi kinerja makro buruk karena disebabkan faktor eksternal diluar kendali pemerintah daerah, misalnya terjadi krisis global atau nasional yang berimbas ke daerah dan bencana alam. Jadi, langkah pertama analisis laporan keuangan adalah melihat kinerja makro terlebih dahulu baru selanjutnya menganalisis laporan keuangan yang merupakan kinerja mikro.
2. Menilai Kinerja Program/Kegiatan

Langkah kedua yang perlu dilakukan adalah menilai kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah. Kinerja program dan kegiatan dapat dilihat dari LKPJ Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintah dan Pembangunan atau dari Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan dinilai dari aspek 3E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomi terkait penggunaan sumber daya input secara hemat tidak terjadi pemborosan, efisiensi terkait dengan kesesuaian pelaksanaan dengan anggaran, dan efektivitas terkait dengan ketercapaian target.

3. Menilai Kinerja Keuangan

Langkah terakhir yang dapat dilakukan yaitu penilaian kinerja keuangan secara lebih rinci dengan cara melakukan analisis laporan keuangan. Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu dianalisis agar dapat memberikan gambaran kinerja keuangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa dalam menganalisis dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah secara tepat dan komprehensif, analisis laporan keuangan membutuhkan tahapan agar pelaksanaan analisis efisien dan efektif. Tahapan analisis laporan keuangan meliputi analisis kinerja makro, analisis kinerja program/kegiatan, dan analisis kinerja keuangan atau laporan keuangan.

2.1.5 Rasio Keuangan

Menurut Faud (2016:136), “rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satuan angka dengan angka lainnya, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.”

2.1.5.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2016:140), “rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal.” Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan ; Mahmudi 2016 rasio kemandirian dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} 100\%$$

Menurut Halim dan Kusufi (2012:278) kriteria kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- Rendah sekali (0 – 25%) bersifat instruktif
- Rendah (25% - 50%) bersifat konsultatif
- Sedang (50% - 75%) bersifat partisipatif
- Tinggi (75% - 100%) bersifat delegatif

Keterangan:

- a. Pola hubungan instruktif, di mana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

2.1.5.2 Rasio Efektivitas PAD

Menurut Mahmudi (2016:141), “rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.” Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Sangat efektif : >100%
- Efektif : 100%
- Cukup efektif : 90%-99%

- Kurang efektif : 75%-89%
- Tidak efektif : <75%

Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan ; Mahmudi 2016 rasio efektivitas PAD dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target penerimaan PAD yang telah dianggarkan.

2.1.5.3 Rasio Pertumbuhan PAD

Menurut Mahmudi (2016:137), “rasio pertumbuhan berguna untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif.” Jika terjadi pertumbuhan pada pendapatan suatu daerah maka dapat mengimbangi laju inflasi, dan sebaliknya. Jika mengalami penurunan maka dapat menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunannya, apakah karena faktor ekonomi makro yang di luar kendali pemerintah daerah atau karena manajemen keuangan daerah yang kurang baik. Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan ; Mahmudi 2016 pertumbuhan pendapatan pada tahun tertentu (t) dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan th t} = \frac{\text{Pendapatan Th t} - \text{Pendapatan Th (t - 1)}}{\text{Pendapatan Th (t - 1)}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui pertumbuhan atas sumber pendapatan dan pengeluaran, pemerintah daerah dapat menggunakannya menjadi bahan evaluasi atas potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

Kriteria pertumbuhan dapat diukur sebagai berikut:

- PAD tahun sebelumnya < PAD tahun berikutnya : positif
- PAD tahun sebelumnya > PAD tahun berikutnya : negatif

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari satu periode ke periode berikutnya.

2.1.5.4 Rasio Keserasian Belanja

Menurut Mahmudi (2016:160), “analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antarbelanja.” Agar anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis keserasian belanja:

a. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90 persen. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20 persen. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) secara optimal.

2.1.5.5 Rasio Efisiensi Belanja

Menurut Mahmudi (2016:164), “rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja”. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan ; Mahmudi 2016 rasio efisiensi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio efisiensi belanja menggambarkan tingkat penghematan anggaran belanja yang digunakan pemerintah dengan cara membandingkan realisasi belanja dan anggaran belanja.

2.1.6 Kinerja Keuangan

Mahsun (2014:25), “kinerja keuangan adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi.” Halim dan Kusufi (2012:212) menjelaskan bahwa:

Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah yaitu salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah yang mana penilaiannya menggunakan rasio keuangan yang terbentuk dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah.

Sementara tujuan pengukuran kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah, pengukuran kinerja untuk membantu pemerintah pada tujuan dan sasaran program kerja sehingga akan meningkatkan penyediaan layanan publik, mengalokasikan sumber daya, membuat keputusan, mewujudkan akuntabilitas publik dan meningkatkan komunikasi kelembagaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pengertian kinerja keuangan pemerintah daerah adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai sejauh mana pemerintah

daerah telah melaksanakan aktivitas atau tugasnya sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan keuangan daerah yang baik dan benar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian ini dan menjadi acuan penulis dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil
1.	Ni Made Diah Permata Sari dan I Ketut Mustanda (2019)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	X1 : Ukuran Pemerintah Daerah X2 : PAD X3 : Belanja Modal Y : Kinerja Keuangan	Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan sedangkan PAD dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung.
2.	Joice Machmud dan Lukfiah Irwan Radjak (2018)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo	X1 : PAD X2 : DAU X3 : DAK Y : Kinerja Keuangan	Secara parsial PAD dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. DAK berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan secara simultan PAD, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo.

3.	Nizwan Zukhri (2020)	Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal	X1 : Rasio Kemandirian X2 : Rasio Derajat Ketergantungan Daerah X3 : Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Y : Kinerja Keuangan	Tingkat kemandirian keuangan berada pada level rendah yang berarti berada pada pola hubungan konsultatif, tingkat ketergantungan keuangan berada pada kategori sangat tinggi atau sangat tergantung pada dana dari pemerintah pusat sedangkan derajat desentralisasi fiskal berada pada kategori cukup.
4.	Ai Siti Farida, Raden Faisal Maulana Nugraha (2019)	Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang	X1 : Rasio Kemandirian X2 : Rasio Keharmonisan X3 : Rasio Pertumbuhan X4 : Rasio Efisiensi X5 : Rasio Efektivitas Y : Kinerja Keuangan	1. Rasio kemandirian sangat mandiri dengan rata-rata 17,1% 2. Rasio pertumbuhan masih sangat rendah dengan rata-rata 8,6% 3. Rasio efisiensi PAD tidak efisien dengan rata-rata 63,3% 4. Rasio efektivitas PAD sudah efektif dengan rata-rata diatas 100% yaitu 113,8%.
5.	Hery Susanto (2019)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan	X1 : Rasio Efektivitas X2 : Rasio Efisiensi X3 : Rasio Kemandirian X4 : Rasio Aktiiftas	1. Rasio efektifitas dikategorikan efektif karena persentase

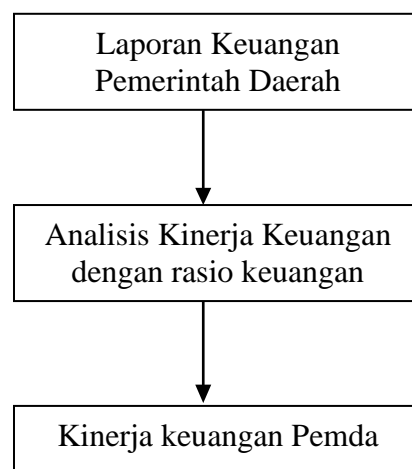
		Pemerintah Daerah Kota Mataram	X5 : Rasio Pertumbuhan X6 : Rasio Pendapatan X7 : Rasio Pertumbuhan Belanja Y : Kinerja Keuangan	diatas seratus, yakni 101,85% 2. Rasio efisiensi dikategorikan kurang efisien karena persentase dibawah seratus, yakni 99,12% 3. Rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah dengan tingkat rata-rata 17,71% 4. Rasio aktifitas pengelolaan keuangan daerah masih rendah dengan rata-rata belanja operasi 78,89% dan belanja modal 17,71% 5. Rasio pertumbuhan PAD kurang baik karena terjadi penurunan PAD setiap tahun selama kurun waktu perhitungan tahun anggaran.
6.	Herry Goenawan Soedarsa (2020)	Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	X1 : Rasio Kemandirian Keuangan X2 : Rasio Efektivitas	1. Rasio kemandirian daerah berada pada pola hubungan

		Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasarawan Tahun 2010-2014	X3 : Rasio Efisien X4 : Share and Growth. Y : Kinerja Keuangan	instruktif sebesar 3,01% 2. Rasio efektivitas pengelolaan keuangan sangat efektif dengan rata-rata 168,822% 3. Rasio efisiensi kurang Efisien dengan rata-rata 98,38% 4. Share 31,11% dan Growth 299,622% serta pemetaan kemampuan keuangan daerah berada pada kuadran II
--	--	--	--	--

Sumber: referensi terkait dari tahun 2017 - 2020.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan masalah yang diteliti, landasan teori dan beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka penulis mengembangkan kerangka pemikiran yang dapat menggambarkan secara tepat dan ringkas terhadap objek yang akan diteliti. Kerangka pemikiran yang dibuat untuk penelitian ini ditunjukkan pada gambar 2.2.



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.2, variabel yang akan diteliti adalah kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Pada penelitian ini kinerja keuangan pemerintah daerah diukur menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi belanja, rasio keserasian belanja dan rasio pertumbuhan PAD.